

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 207 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Renja Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Sekretariat DPRD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sekretariat DPRD untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Sekretariat DPRD untuk melaksanakan rencana kerja Sekretariat DPRD;
(2) Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Sekretariat DPRD dengan dokumen RKPD dan Renstra Sekretariat DPRD;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Sekretariat DPRD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA Sekretariat DPRD.

(2) Renja Sekretariat DPRD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRD tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Sekretariat DPRD meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;

c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Sekretariat DPRD dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Sekretariat DPRD.

Pasal 7

(1) Sekretariat DPRD membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD.

(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Sekretariat DPRD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Sekretariat DPRD tahun berjalan.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.

(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala Sekretariat DPRD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan evaluasi hasil Renja Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Sekretariat DPRD.

(3) Kepala Sekretariat DPRD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Sekretariat DPRD.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Pasal 9

(1) Renja Sekretariat DPRD dapat diubah apabila:
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari:
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Sekretariat DPRD tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 207

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

I. I. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana pembangunan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra PD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sebagai penjabaran dari Renstra PD, maka PD membuat rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) PD.

Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Tahun 2026.

Selanjutnya, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2026 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2026, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026 untuk selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 Adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

d. Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berkaitan dengan SKPD yang bersangkutan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);

n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

o. Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 9)

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah agar tersedia dokumen perencanaan tahunan yang memuat uraian rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sesuai dokumen Renja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah untuk menjamin konsistensi rencana teknis program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2026 untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA 2026.

I.4 Sistematika

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dinilai berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 70 (tujuh puluh) Sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan realisasi semester I (satu) pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, terdapat program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dan program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

Berikut ini merupakan capaian kinerja masing-masing program pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2025

No.	Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	43.26%	43.26%
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	44.16%	44.16%

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Semester I Tahun 2025 mayoritas program terealisasi, namun beberapa program belum dapat terealisasi secara optimal, mengingat pada tahun 2025 ada kegiatan yang secara pewaktuan akan dilaksakan pada Semester II, sehingga belanja kegiatan baik belanja modal maupun belanja operasi lainnya belum dapat terserap sepenuhnya. Selain itu, terdapat kelebihan sisa anggaran yang disebabkan oleh selisih lebih dari sisa belanja akibat Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) yang terlalu tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja rill yang telah dilaksanakan.

Namun secara umum keseluruhan program kegiatan masih memiliki capaian kerja yang baik.

Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2025
Kabupaten Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**										
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-Nilai AKIP -Persentase BMD Dalam Kondisi Baik**	**-75 Poin - 80 Persen**	**-74,70 Poin - 90,84 Persen**	**-74,70 Poin - 80 Persen**	**-80,10 Poin - 93,86 Persen**	**-80,10 Poin - 93,86 Persen**	**-80,10 Poin - 80 Persen**	**-0 Poin - 0 Persen**	**-154.8 Poin - 184.7 Persen**	**-206.4 Persen - 230.87 Persen**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100 Persen**	**59,04 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**14.28 Persen**	**173.32 Persen**	**173.32 Persen**
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	80%
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	8 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	0 Laporan	11 Laporan	73.33%
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100 Persen**	**63,33 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**14.99 Persen**	**14.99 Persen**	**14.99 Persen**
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2700 Orang/bulan	1980 Orang/bulan	540 Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	100%	540 Orang/Bulan	144 Orang/Bulan	2664 Orang/Bulan	98.66%
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Vengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	2 Dokumen	50 Dokumen	83.33%
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	0 Laporan	8 Laporan	80%
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	50 Laporan	83.33%

4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**100 Persen**	**117,93 Persen**	**100 Persen**	**202,25 Persen**	**202,25 Persen**	**100 Persen**	**42.16 Persen**	**42.16 Persen**	**42.16 Persen**
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	0 Paket	8 Paket	53.33%
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	275 Orang	588 Orang	55 Orang	153 Orang	278%	55 Orang	46 Orang	787 Orang	286.18%
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	85 Orang	35 Orang	80 Orang	229%	35 Orang	15 Orang	180 Orang	240%
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100 Persen**	**69,21 Persen**	**100 Persen**	**94,81 Persen**	**94,81 Persen**	**100 Persen**	**8.51 Persen**	**8.51 Persen**	**8.51 Persen**
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80 Paket	32 Paket	16 Paket	16 Paket	100%	16 Paket	0 Paket	48 Paket	60%
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	345 Paket	241 Paket	69 Paket	69 Paket	100%	69 Paket	0 Paket	310 Paket	89.85%
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90 Paket	130 Paket	18 Paket	24 Paket	133,33%	18 Paket	0 Paket	154 Paket	171.11%
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	35 Paket	10 Paket	15 Paket	150%	10 Paket	2 Paket	52 Paket	104%
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75 Paket	46 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	0 Paket	61 Paket	81.33%
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	525 Dokumen	541 Dokumen	180 Dokumen	126 Dokumen	70%	180 Dokumen	0 Paket	667 Paket	127.04%
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	50 Laporan	83.33%
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	26 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	2 Laporan	33 Laporan	94.28%
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**26,66 Persen**	**100 Persen**	**283,33 Persen**	**283,33 Persen**	**100 Persen**	**0 Persen**	**65 Persen**	**65 Persen**
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0 Unit	6 Unit	600%	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	8 Paket	2 Paket	5 Paket	250%	2 Paket	0 Paket	13 Paket	130%
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**60 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**19.44 Persen**	**19.44 Persen**	**19.44 Persen**
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	50 Laporan	83.33%
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	51 Laporan	85%
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	50 Laporan	83.33%
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**175,66 Persen**	**100 Persen**	**117,81 Persen**	**117,81 Persen**	**100 Persen**	**0.89 Persen**	**0.89 Persen**	**0.89 Persen**
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	11 Unit	5 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	11 Unit	44%
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	79 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	0 Unit	99 Unit	99%
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	7 Unit	50 Unit	55 Unit	110%	50 Unit	0 Unit	62 Unit	310%
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	161 Unit	64 Unit	126 Unit	196.87%	64 Unit	4 Unit	291 Unit	1455%
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	8 Unit	3 Unit	6 Unit	200%	3 Unit	0 Unit	14 Unit	116.66%
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	8 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	0 Unit	14 Unit	350%

4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu**	**100 Persen**	**55,83 Persen**	**100 Persen**	**93,88 Persen**	**93,88 Persen**	**100 Persen**	**8.33 Persen**	**8.33 Persen**	**8.33 Persen**
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	3300 Orang/Bulan	1980 Orang/Bulan	660 Orang/Bulan	659 Orang/Bulan	99,84%	660 Orang/Bulan	165 Orang/Bulan	2804 Orang/Bulan	84.96%
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	26 Paket	15 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	0 Paket	21 Paket	80.76%
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	275 Orang	137 Orang	55 Orang	45 Orang	81,81%	55 Orang	0 Orang	182 Orang	66.18%
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD**	**100 Persen**	**41,66 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**13.88 Persen**	**13.88 Persen**	**13.88 Persen**
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	55 dokumen	0 dokumen	5 Dokumen	55 Dokumen	100%	5 Dokumen	0 Dokumen	55 Dokumen	100%
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	50 Laporan	83.33%
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Laporan	65 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan	5 Laporan	90 Laporan	90%
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**- Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu -Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti**	**- 100 Persen -100 Persen**	**- 100 Persen -100 Persen**	**- 100 Persen -100 Persen**	**- 116.66 Persen -66.46 Persen**	**- 116.66 Persen -66.46 Persen**	**- 100 Persen -100 Persen**	**- 10.07 Persen -13.87 Persen**	**- 10.07 Persen -13.87 Persen**	**- 10.07 Persen -13.87 Persen**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan**	**100 Persen**	**68,75 Persen**	**100 Persen**	**150 Persen**	**150 Persen**	**100 Persen**	**0 Persen**	**95.41 Persen**	**95.41 Persen**
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	40 Dokumen	38 Dokumen	8 Dokumen	11 Dokumen	137.50%	8 Dokumen	0 Dokumen	49 Dokumen	122.50%
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40 Dokumen	35 Dokumen	8 Dokumen	13 Dokumen	162.50%	8 Dokumen	0 Dokumen	48 Dokumen	120%
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	4 dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	120%
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	10 Dokumen	15 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	0 Dokumen	16 Dokumen	160%
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50%
4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	840 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan**	**100 Persen**	**60 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**0 Persen**	**0 Persen**	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	80%
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	80%
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya**	**100 Persen**	**79,33 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**30.21 Persen**	**105.60 Persen**	**105.60 Persen**
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	65 Laporan	57 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	5 Laporan	75 Laporan	115.38%
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	65 Laporan	51 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	5 Laporan	69 Laporan	106.15%
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	65 Laporan	51 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	6 Laporan	70 Laporan	107.69%
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	65 Laporan	59 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	6 Laporan	78 Laporan	120%
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	60%
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	10 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	15 Dokumen	150%
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%

4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD**	**100 Persen**	**114,16 Persen**	**100 Persen**	**171.63 Persen**	**171.63 Persen**	**100 Persen**	**29.55 Persen**	**213.92 Persen**	**213.92 Persen**
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	20 Dokumen	0 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	100%	55 Dokumen	0 Dokumen	55 Dokumen	275%
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	40 Dokumen	37 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	150%	8 Dokumen	6 Dokumen	55 Dokumen	137.50%
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	40 Orang	0 Orang	8 Orang	4 Orang	50%	8 Orang	0 Orang	4 Orang	10%
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	480 Orang	276 Orang	96 Orang	96 Orang	100%	96 Orang	8 Orang	380 Orang	79.16%
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	49 Dokumen	17 Dokumen	13 Dokumen	76.47%	17 Dokumen	4 Dokumen	66 Dokumen	330%
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	20%
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	240 Dokumen	970 Dokumen	80 Dokumen	500 Dokumen	625%	80 Dokumen	80 Dokumen	1550 Dokumen	645.83%
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**72,14 Persen**	**100 Persen**	**66.46 Persen**	**66.46 Persen**	**100 Persen**	**13.87 Persen**	**94.835 Persen**	**94.835 Persen**
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	45 Laporan	24 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	33.33%	9 Laporan	2 Laporan	29 Laporan	64.44%
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	275 Dokumen	164 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	100%	55 Dokumen	0 Dokumen	219 Dokumen	79.63%
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses	275 Dokumen	483 Dokumen	165 Dokumen	109 Dokumen	66.06%	165 Dokumen	55 Dokumen	647 Dokumen	235.27%
4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	300 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase penegakan kode etik Anggota DPRD**	**100 Persen**	**27,14 Persen**	**100 Persen**	**92.85 Persen**	**92.85 Persen**	**100 Persen**	**0 Persen**	**60.71 Persen**	**60.71 Persen**
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50%
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	35 Laporan	19 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	85.71%	7 Laporan	0 Laporan	25 Laporan	71.42%
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase Publikasi Kegiatan DPRD dalam media resmi**	**100 Persen**	**602,08 Persen**	**100 Persen**	**158.33 Persen**	**158.33 Persen**	**100 Persen**	**2.08 Persen**	**634.16 Persen**	**634.16 Persen**
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	240 Dokumen	1445 Dokumen	48 Dokumen	76 Dokumen	158.33%	48 Dokumen	1 Dokumen	1522 Dokumen	634.16%
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi**	**100 Persen**	**136,77 Persen**	**100 Persen**	**115.38 Persen**	**115.38 Persen**	**100 Persen**	**21.73 Persen**	**184.74 Persen**	**184.74 Persen**
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dokumen	60 Dokumen	13 Dokumen	8 Dokumen	61.53%	13 Dokumen	4 Dokumen	72 Dokumen	553.84%
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	20%
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	180 Dokumen	64 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	30 Dokumen	4 Dokumen	98 Dokumen	54.44%
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	28 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	14 Dokumen	200%	7 Dokumen	3 Dokumen	31 Dokumen	110.71%

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja kegiatan selama tahun 2021-2025 dapat dicapai dengan baik. Namun pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pencapaiannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang secara pewaktuan tidak dapat disesuaikan, sehingga belanja kegiatan baik belanja modal maupun belanja operasi lainnya tidak dapat terserap sepenuhnya. Selain itu, terdapat kelebihan sisa anggaran yang disebabkan oleh selisih lebih dari sisa belanja akibat Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) yang terlalu tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja rill yang telah dilaksanakan, sehingga sampai dengan Triwulan I tahun 2025 capaian Renstra Sekretariat DPRD menunjukkan hasil yang kurang optimal.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Kabupaten Bandung adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Meningkatnya pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan;

3. Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD.

Adapun indikator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti;
3. Nilai AKIP;
4. Persentase BMD dalam Keadaan Baik.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung bukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), tetapi berdasarkan rumusan indikator kinerja utama. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator-indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai AKIP			67	68	74,70	75	76	74,70	80,10	80,10	81	
4	Persentase BMD dalam Kondisi Baik			80%	80%	80%	80%	80%	82,77%	93,86%	80%	80%	

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

II.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sampai dengan pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat kegiatan yang belum optimal realiasi capaian kinerjanya, dikarenakan adanya pewaktuan yang tidak cukup dalam merealisasikan kegiatan belanja modal maupun belanja operasi.
2. Capaian kinerja lebih rendah daripada realisasi anggaran dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang sudah ada realisasi anggarannya namun kinerjanya belum tercapai penuh.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelaksanaan renja Tahun 2023 dan 2024, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan pewaktuan yang baik dalam merealisasikan kegiatan belanja modal maupun belanja operasi (perjalanan dinas) anggota DPRD, sehingga dapat mencapai target penyerapan anggaran;
2. Melakukan penyusunan SSH dan SBU yang sesuai, sehingga meminimalisir sisa lebih anggaran akibat selisih standar harga yang terlalu tinggi dibandingkan standar harga riil yang direalisasikan;
3. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung antara lain:

1. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan;
2. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada;
3. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan dan ketersedian dana *cash budget* yang disusun;
4. Banyak aspirasi yang masuk ke lembaga DPRD yang harus dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan.
5. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

II.4. Review terhadap RKPD Kabupaten Bandung

Dalam proses perencanaan program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD tahun 2026 memang beberapa usulan yang diajukan di dalam RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan–peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2026 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya penganggaran didaerah adalah sebagai berikut : *Tabel 2.3 Review terhadap RKPD tahun 2026.*

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Kode Rek					Ranwal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	**02**				**Sekretariat DPRD**			**97,800,230,000.00**	**Sekretariat DPRD**				**107,800,230,000.00**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Indeks Manajemen Risiko - Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**50 Poin 73 Poin**	**84,701,169,000.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**- Indeks Manajemen Risiko - Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**50 Poin 73 Poin**	**87,805,400,512.00**	
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**80.10 Poin**	**135,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai AKIP**	**80.10 Poin**	**135,000,000.00**	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000.00	
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25,000,000.00	
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10,000,000.00	

4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100%**	**12,541,271,000.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100%**	**12,541,271,000.00**	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/Bulan	12,456,271,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/Bulan	12,456,271,000.00	
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15,000,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15,000,000.00	
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	30,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	30,000,000.00	
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	40,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	40,000,000.00	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**		**659,500,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**		**659,500,000.00**	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	107,500,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	107,500,000.00	
4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	302,000,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	302,000,000.00	
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	250,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	250,000,000.00	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100%**	**1,719,400,000.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100%**	**1,823,781,762.00**	
4.00	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	30,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	30,000,000.00	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69 Paket	200,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69 Paket	200,000,000.00	

4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	180,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	180,000,000.00	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	84,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	84,000,000.00	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	250,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	250,000,000.00	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	300,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	300,000,000.00	
4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25,400,000.00	Penyediaan Bahan/Material	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25,400,000.00	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	450,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	554,381,762.00	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Dokumen	200,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Dokumen	200,000,000.00	
4.00	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**50,000,000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**50,000,000.00**	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50,000,000.00	Pengadaan Mebel	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50,000,000.00	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1,657,972,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4,498,111,000.00**	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	20,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	20,000,000.00	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	338,942,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	486,905,050.00	

4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,299,030,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,991,205,950.00	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**80%**	**1,142,372,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**80%**	**1,142,372,000.00**	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	464,850,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	464,850,000.00	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	456,622,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	456,622,000.00	
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	15,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	15,000,000.00	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	145,400,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	145,400,000.00	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000.00	
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	10,500,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	10,500,000.00	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu**	**100%**	**65,455,855,000.00**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu**	**100%**	**65,615,565,750.00**	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	660 Orang/Bulan	64,775,505,000.00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	660 Orang/Bulan	64,775,505,000.00	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	275 Paket	577,500,000.00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	275 Paket	577,500,000.00	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	102,850,000.00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	262,560,750.00	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD**	**100%**	**1,339,799,000.00**	**Layanan Administrasi DPRD**		**Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD**	**100%**	**1,339,799,000.00**	

4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	10,000,000.00	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	10,000,000.00	
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	557,700,000.00	Fasilitasi Fraksi DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	557,700,000.00	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 Laporan	772,099,000.00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 Laporan	772,099,000.00	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-Persentase Penetapan Raperda Tahun N -Katepatan Penetapan Perda APBD - Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD**	**- 80% - 80% -80% -80%**	**13,099,061,000.00**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**-Persentase Penetapan Raperda Tahun N -Katepatan Penetapan Perda APBD - Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD**	**- 80% - 80% -80% -80%**	**19,994,829,488.00**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan**	**100%**	**1,524,606,000.00**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan**	**100%**	**2,853,295,000.00**	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	300,000,000.00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	300,000,000.00	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang Ditetapkan	8 Dokumen	850,000,000.00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Rancangan Perda yang Ditetapkan	8 Dokumen	2,103,689,000.00	
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan yang Diselenggarakan	1 Dokumen	104,606,000.00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan yang Diselenggarakan	1 Dokumen	104,606,000.00	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang Disusun	2 Dokumen	120,000,000.00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang Disusun	2 Dokumen	195,000,000.00	
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	280 Orang	150,000,000.00	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	280 Orang	150,000,000.00	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100%**	**2,050,000,000.00**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100%**	**2,707,951,088.00**	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	200,000,000.00	Pembahasan KUA dan PPAS	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	263,984,000.00	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	200,000,000.00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	575,023,000.00	

4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	500,000,000.00	Pembahasan APBD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	500,000,000.00	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	500,000,000.00	Pembahasan APBD Perubahan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	590,560,888.00	
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	150,000,000.00	Pembahasan Laporan Semester	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	253,254,000.00	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	500,000,000.00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	525,129,200.00	
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya**	**100%**	**1,885,561,000.00**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya**	**100%**	**2,691,550,000.00**	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	13 Laporan	350,000,000.00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	13 Laporan	465,719,000.00	
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	13 Laporan	350,000,000.00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	13 Laporan	483,493,200.00	
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13 Laporan	350,000,000.00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13 Laporan	498,700,900.00	
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	13 Laporan	350,000,000.00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	13 Laporan	547,699,400.00	
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	34,129,000.00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	153,363,300.00	
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	150,000,000.00	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	150,000,000.00	
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	301,432,000.00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	392,574,200.00	

4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya**	**100%**	**2,339,000,000.00**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya**	**100%**	**3,269,565,900.00**	
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	5 Dokumen	35,000,000.00	Orientasi DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	5 Dokumen	35,000,000.00	
4	02	02	2.04	0002	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	8 Dokumen	1,465,000,000.00	Bimbingan Teknis DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	8 Dokumen	2,147,245,900.00	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	28,000,000.00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	28,000,000.00	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli bagi Fraksi	96 Orang	336,000,000.00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Tenaga Ahli bagi Fraksi	96 Orang	584,320,000.00	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Hearing/Dialog	17 Dokumen	60,000,000.00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kegiatan Hearing/Dialog	17 Dokumen	60,000,000.00	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	15,000,000.00	Penyusunan Program Kerja DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	15,000,000.00	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	80 Dokumen	400,000,000.00	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		400,000,000.00	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti**	**100%**	**3,585,812,000.00**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti**	**100%**	**6,573,427,500.00**	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	9 Laporan	150,000,000.00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	9 Laporan	150,000,000.00	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	55 Dokumen	35,000,000.00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	55 Dokumen	35,000,000.00	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses	55 Dokumen	3,250,812,000.00	Pelaksanaan Reses	Semua Wilayah Pemda	JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses	55 Dokumen	6,238,427,500.00	
4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	100 Orang	150,000,000.00	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	100 Orang	150,000,000.00	
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang Diawasi**	**100%**	**296,744,000.00**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Persentase Anggota DPRD yang Diawasi**	**100%**	**296,744,000.00**	
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	-	Penyusunan Kode Etik DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	-	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	7 Laporan	296,744,000.00	Pengawasan Kode Etik DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	7 Laporan	296,744,000.00	

4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun**	**100%**	**256,270,000.00**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun**	**100%**	**256,270,000.00**	
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	48 Dokumen	256,270,000.00	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	48 Dokumen	256,270,000.00	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi**	**100%**	**1,161,068,000.00**	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi**	**100%**	**1,346,026,000.00**	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 Laporan	600,000,000.00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 Laporan	600,000,000.00	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1 Dokumen	15,000,000.00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1 Dokumen	15,000,000.00	
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang Difasilitasi	3 Laporan	296,068,000.00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang Difasilitasi	3 Laporan	296,068,000.00	
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7 Dokumen	250,000,000.00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7 Dokumen	434,958,000.00	

II.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *top down.* Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musrenbang Tingkat Kota/Kabupaten. Pada tahap Forum PD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu–isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bapperida. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau dari masyarakat Kabupaten Bandung untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

Tabel 2.5 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah:	Sekretariat DPRD				
No.	**Pogram/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Besaran/Volume**	**Catatan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi, antara lain :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung

Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang berjalan dengan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung

Sekretariat DPRD mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung.

Dengan tujuan tersebut Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tri fungsi DPRD yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu				**Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu**		**Persentase Rata-rata capaian kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD + Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran + Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan + Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**
		Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			**Indeks Reformasi Birokrasi**		**Indeks Reformasi Birokrasi**
					Indeks Manajemen Resiko		**Indeks Manajemen Resiko**
			Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Reformasi Birokrasi**
					Indeks Manajemen Resiko		**Indeks Manajemen Resiko**
				Tercapainya pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	**Nilai AKIP SETWAN**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tercapainya Pemenuhan Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	(Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun) x100%
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tercapainya pemenuhan Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	**Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	(Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun) x100%

					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi PeraturanPerundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Tercapainya pemenuhan dokumen Pelayanan Administrasi Umum Kantor	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	(Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun) x100%
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	(Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi) x100%
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tercapainya pemenuhan laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun) x100%
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Tercapainya pengelolaan BMD dalam kondisi baik	**Persentase BMD Dalam kondisi Baik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	(Jumlah Aset Barang Milik Daerah / Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik) x100%
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Tercapainya pemenuhan layanan kesejahteraan Anggota DPRD tepat waktu	**Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	(Jumlah anggota dewan yang mendapatkan pelayanan / jumlah anggota dewan yang ada) x 100%
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up

					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi PeraturanPerundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Tercapainya pemenuhan dokumen Pelayanan Administrasi Umum Kantor	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	(Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun) x100%
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	(Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi) x100%
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tercapainya pemenuhan laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun) x100%
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Tercapainya pengelolaan BMD dalam kondisi baik	**Persentase BMD Dalam kondisi Baik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	(Jumlah Aset Barang Milik Daerah / Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik) x100%
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Tercapainya pemenuhan layanan kesejahteraan Anggota DPRD tepat waktu	**Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	(Jumlah anggota dewan yang mendapatkan pelayanan / jumlah anggota dewan yang ada) x 100%
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up

				Tercapainya pemenuhan fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD	**Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD**	**Layanan Administrasi DPRD**	**(Jumlah kegiatan administrasi tugas DPRD yang terlaksana/Jumlah fasilitasi Administrasi tugas DPRD) x 100%**
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
		Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			**Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**		**Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**
				Meningkatnya Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan	**Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**(Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan/Jumlah Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD) x 100%**
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
				Meningkatnya Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Persentase Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**(Jumlah Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan / Jumlah Rancangan peraturan kebijakan Anggaran yang dibahas) x100%**
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
				Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	**Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**(Jumlah PD yang diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya /Jumlah PD) X 100%**
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

				Meningkatanya Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya	**Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**(Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD / Jumlah Anggota DPRD) X 100%**
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD
				Meningkatnya Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti	**Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**(Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti / Jumlah Aspirasi Mayarakat) x 100%**
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun
					JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
				Meningkatnya Persentase Anggota DPRD yang Diawasi	**Persentase penegakan kode etik Anggota DPRD**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**(Jumlah Anggota dewan yang melaksanakan kode etik - Jumlah Anggota dewan yang terkena kode etik / Jumlah Anggota Dewan) X 100%**
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD
				Meningkatnya Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun	**Persentase Publikasi Kegiatan DPRD dalam media resmi**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**(Jumlah Publikasi kegiatan DPRD di media resmi/ jumlah kegiatan DPRD) x100%**
					Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun
				Meningkatnya Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi	**Persentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**(Jumlah Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD/Jumlah seluruh kegiatan pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD) x 100%**
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

III.3. Program dan Kegiatan

Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Bandung, maka pada Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan 2 program, 17 Kegiatan dan 73 Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 107.800.230.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
      1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
      1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
      1.1. 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi
1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.3.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.5. Penyediaan Barang Cetakan & penggandaan
1.4.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.4.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
1.5.1 . Pengadaan Mebeler

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan dan Pajak

1.7.2. Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.3. Pemeliharaan Mebel

1.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

1.7.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

1.8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

1.8.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

1.8.3. Pelaksanaan *Medical Check Up*

1.9. Layanan Administrasi DPRD

1.9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD

1.9.2. Fasilitasi Fraksi DPRD

1.9.3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

2.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

2.1.2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2.1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

2.1.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

2.1.5 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

2.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS

2.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

2.2.3. Pembahasan APBD

2.2.4. Pembahasan APBD Perubahan

2.2.5. Pembahasan Laporan Semester

2.2.6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

2.3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

2.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

2.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan

Rakyat

2.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

2.3.5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

2.3.6. Pengawasan Penggunaan Anggaran

2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD

2.4.1. Orientasi DPRD

2.4.2. Pendalaman Tugas DPRD

2.4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

2.4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

2.4.5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

2.4.6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

2.4.7 Penyusunan Program Kerja DPRD

2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

2.5.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah

2.5.2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

2.5.3. Pelaksanaan Reses

2.5.4 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

2.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

2.6.1 Pengawasan Kode Etik DPRD

2.7. Pembahasan Kerja Sama Daerah

2.7.1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

2.8. Fasilitasi Tugas DPRD

2.8.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

2.8.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

2.8.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

2.8.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel 3.2 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Indeks Manajemen Risiko - Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**		**50 Poin 73 Poin**	**87,805,400,512.00**	**APBD Kab. Bandung**		**50 Poin 73 Poin**	**88,962,904,550.00**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**		**80.10 Poin**	**135,000,000.00**	**APBD Kab. Bandung**		**80.10 Poin**	**271,769,500.00**
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen	20,000,000.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	20,000,000.00
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	20,000,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	34,655,000.00
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	20,000,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	36,183,500.00
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	20,000,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	20,000,000.00
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	20,000,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	20,000,000.00
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Semua Wilayah Pemda	1 Laporan	25,000,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Laporan	130,931,000.00
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	3 Laporan	10,000,000.00	APBD Kab. Bandung		3 Laporan	10,000,000.00

4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**		**100%**	**12,541,271,000.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**12,649,440,300.00**
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Wilayah Pemda	540 Orang/Bulan	12,456,271,000.00	APBD Kab. Bandung		540 Orang/Bulan	12,456,271,000.00
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Semua Wilayah Pemda	12 Dokumen	15,000,000.00	APBD Kab. Bandung		12 Dokumen	18,085,300.00
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Semua Wilayah Pemda	2 Laporan	30,000,000.00	APBD Kab. Bandung		2 Laporan	98,108,000.00
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Semua Wilayah Pemda	12 Laporan	40,000,000.00	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	76,976,000.00
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**		**100%**	**659,500,000.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**1,513,172,800.00**
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Semua Wilayah Pemda	100 Paket	107,500,000.00	APBD Kab. Bandung		100 Paket	131,400,000.00
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	55 Orang	302,000,000.00	APBD Kab. Bandung		55 Orang	302,000,000.00
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Semua Wilayah Pemda	35 Orang	250,000,000.00	APBD Kab. Bandung		35 Orang	1,079,772,800.00
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**		**100%**	**1,823,781,762.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**3,866,135,900.00**
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	16 Paket	30,000,000.00	APBD Kab. Bandung		16 Paket	30,000,000.00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	69 Paket	200,000,000.00	APBD Kab. Bandung		69 Paket	808,504,100.00
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	18 Paket	180,000,000.00	APBD Kab. Bandung		18 Paket	187,120,000.00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	10 Paket	84,000,000.00	APBD Kab. Bandung		10 Paket	204,783,300.00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	15 Paket	250,000,000.00	APBD Kab. Bandung		15 Paket	792,215,500.00
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	180 Dokumen	300,000,000.00	APBD Kab. Bandung		180 Dokumen	300,000,000.00
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	1 Paket	25,400,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Paket	25,400,000.00
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Wilayah Pemda	12 Laporan	554,381,762.00	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	985,300,000.00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Semua Wilayah Pemda	5 Dokumen	200,000,000.00	APBD Kab. Bandung		5 Dokumen	532,813,000.00

4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**		**80**	**50,000,000.00**	**APBD Kab. Bandung**		**80**	**50,000,000.00**
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Dibeli	Semua Wilayah Pemda	2 Unit	50,000,000.00	APBD Kab. Bandung		2 Unit	50,000,000.00
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**		**100%**	**4,498,111,000.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**2,309,935,050.00**
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Wilayah Pemda	2500 Laporan	20,000,000.00	APBD Kab. Bandung		2500 Laporan	20,000,000.00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Semua Wilayah Pemda	12 Laporan	486,905,050.00	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	486,905,050.00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Semua Wilayah	12 Laporan	3,991,205,950.00	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	1,803,030,000.00
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**		**80%**	**1,142,372,000.00**	**APBD Kab. Bandung**		**80%**	**1,303,372,000.00**
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Wilayah Pemda	5 Unit	464,850,000.00	APBD Kab. Bandung		5 Unit	464,850,000.00
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Wilayah Pemda	20 Unit	456,622,000.00	APBD Kab. Bandung		20 Unit	456,622,000.00
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Semua Wilayah	50 Unit	15,000,000.00	APBD Kab. Bandung		50 Unit	15,000,000.00
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Wilayah	64 Unit	145,400,000.00	APBD Kab. Bandung		64 Unit	246,400,000.00
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Semua Wilayah Pemda	3 Unit	50,000,000.00	APBD Kab. Bandung		3 Unit	50,000,000.00
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Semua Wilayah Pemda	6 Unit	10,500,000.00	APBD Kab. Bandung		6 Unit	70,500,000.00
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu**		**100%**	**65,615,565,750.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**65,659,280,000.00**
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang	Semua Wilayah	660 Orang/Bulan	64,775,505,000.00	APBD Kab. Bandung		660 Orang/Bulan	64,775,505,000.00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan	Semua Wilayah	275 Paket	577,500,000.00	APBD Kab. Bandung		275 Paket	748,050,000.00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti	Semua Wilayah	55 Orang	262,560,750.00	APBD Kab. Bandung		55 Orang	135,725,000.00
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD**	Semua Wilayah Pemda	**100%**	**1,339,799,000.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**1,339,799,000.00**
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan	Jumlah Dokumen Hasil	Semua Wilayah	1 Dokumen	10,000,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	10,000,000.00
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Semua Wilayah	12 Laporan	557,700,000.00	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	557,700,000.00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Semua Wilayah Pemda	20 Laporan	772,099,000.00	APBD Kab. Bandung		20 Laporan	772,099,000.00

4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-Persentase Penetapan Raperda Tahun N -Katepatan Penetapan Perda APBD - Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD**		**- 80% - 80% -80% -80%**	**19,994,829,488.00**	**APBD Kab. Bandung**		**- 80% - 80% -80% -80%**	**41,550,292,866.00**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di**		**100%**	**2,853,295,000.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**10,246,740,020.00**
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	Semua Wilayah Pemda	8 Dokumen	300,000,000.00	APBD Kab. Bandung		8 Dokumen	5,588,680,000.00
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Semua Wilayah Pemda	8 Dokumen	2,103,689,000.00	APBD Kab. Bandung		8 Dokumen	4,138,417,800.00
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	104,606,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	104,606,000.00
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen	195,000,000.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	192,250,200.00
4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang	Semua Wilayah Pemda	280 Orang	150,000,000.00			280 Orang	222,786,020.00
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**100%**	**2,707,951,088.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**5,158,312,796.00**
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen	263,984,000.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	626,741,600.00
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen	575,023,000.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	413,459,000.00
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	500,000,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	1,738,260,396.00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	590,560,888.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	1,278,703,800.00
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	253,254,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	217,586,000.00
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	525,129,200.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	883,562,000.00
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya**		**100%**	**2,691,550,000.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**7,718,210,612.00**
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang	Semua Wilayah Pemda	13 Laporan	465,719,000.00	APBD Kab. Bandung		13 Laporan	1,645,907,603.00
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Semua Wilayah Pemda	13 Laporan	483,493,200.00	APBD Kab. Bandung		13 Laporan	1,651,887,603.00
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Semua Wilayah Pemda	13 Laporan	498,700,900.00	APBD Kab. Bandung		13 Laporan	1,651,887,603.00

4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Semua Wilayah Pemda	13 Laporan	547,699,400.00	APBD Kab. Bandung		13 Laporan	1,651,887,603.00
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen	153,363,300.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	168,477,100.00
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	Semua Wilayah	2 Dokumen	150,000,000.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	184,348,100.00
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	392,574,200.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	763,815,000.00
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya**		**100%**	**3,269,565,900.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**6,142,115,788.00**
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Semua Wilayah Pemda	5 Dokumen	35,000,000.00	APBD Kab. Bandung		5 Dokumen	35,000,000.00
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Semua Wilayah Pemda	8 Dokumen	2,147,245,900.00	APBD Kab. Bandung		8 Dokumen	3,406,399,788.00
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar	Semua Wilayah	8 Orang	28,000,000.00	APBD Kab. Bandung		8 Orang	108,080,000.00
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Semua Wilayah	96 Orang	584,320,000.00	APBD Kab. Bandung		96 Orang	637,440,000.00
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan	Semua Wilayah Pemda	17 Dokumen	60,000,000.00	APBD Kab. Bandung		17 Dokumen	157,536,000.00
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	Semua Wilayah	1 Dokumen	15,000,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	15,000,000.00
4.02.02.2.04.0003	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan	Semua Wilayah	80 Dokumen	400,000,000.00	APBD Kab. Bandung		80 Dokumen	1,782,660,000.00
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti**		**100%**	**6,573,427,500.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**9,852,657,500.00**
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Semua Wilayah Pemda	9 Laporan	150,000,000.00	APBD Kab. Bandung		9 Laporan	150,000,000.00
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Semua Wilayah Pemda	55 Dokumen	35,000,000.00	APBD Kab. Bandung		55 Dokumen	206,100,000.00
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Semua Wilayah Pemda	55 Dokumen	6,238,427,500.00	APBD Kab. Bandung		55 Dokumen	9,346,557,500.00
4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Semua Wilayah Pemda	100 Orang	150,000,000.00	APBD Kab. Bandung		100 Orang	150,000,000.00
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang Diawasi**		**100%**	**296,744,000.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**297,842,650.00**
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Semua Wilayah Pemda	7 Laporan	296,744,000.00	APBD Kab. Bandung		7 Laporan	297,842,650.00
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun**		**100%**	**256,270,000.00**	APBD Kab. Bandung		**100%**	**256,270,000.00**
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Semua Wilayah Pemda	48 Dokumen	256,270,000.00	APBD Kab. Bandung		48 Dokumen	256,270,000.00
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi**		**100%**	**1,346,026,000.00**	**APBD Kab. Bandung**		**100%**	**1,878,143,500.00**
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	Semua Wilayah Pemda	13 Dokumen	600,000,000.00	APBD Kab. Bandung		13 Dokumen	690,912,000.00

4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat	Semua Wilayah	1 Laporan	15,000,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Laporan	15,000,000.00
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Semua Wilayah Pemda	3 Dokumen	296,068,000.00	APBD Kab. Bandung		3 Dokumen	372,926,500.00
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Semua Wilayah Pemda	7 Dokumen	434,958,000.00	APBD Kab. Bandung		7 Dokumen	799,305,000.00
JUMLAH					**107,800,230,000.00**				**130,513,197,416.00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

IV.1 Kebutuhan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2026 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026.

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Renja program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**87,805,400,512.00**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**80.10 Poin**	**135,000,000.00**
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000.00
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	20,000,000.00
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	20,000,000.00
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25,000,000.00
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10,000,000.00
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100%**	**12,541,271,000.00**
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/Bulan	12,456,271,000.00
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15,000,000.00
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	30,000,000.00
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	40,000,000.00
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**100%**	**659,500,000.00**
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	107,500,000.00
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	302,000,000.00
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	250,000,000.00

4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100%**	**1,823,781,762.00**
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	30,000,000.00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69 Paket	200,000,000.00
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	180,000,000.00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	84,000,000.00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	250,000,000.00
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	300,000,000.00
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25,400,000.00
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	554,381,762.00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Dokumen	200,000,000.00
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**50,000,000.00**
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50,000,000.00
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**100%**	**4,498,111,000.00**
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000.00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	486,905,050.00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,991,205,950.00
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100%**	**1,142,372,000.00**
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	464,850,000.00
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	456,622,000.00
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	15,000,000.00
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	145,400,000.00
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000.00
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	10,500,000.00
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu**	**100%**	**65,615,565,750.00**
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/Bulan	64,775,505,000.00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	275 Paket	577,500,000.00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	262,560,750.00

4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD**	**100%**	**1,339,799,000.00**
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	10,000,000.00
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	557,700,000.00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 Laporan	772,099,000.00
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu** **-Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti**	**100%** **100%**	**19,994,829,488.00**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan**	**100%**	**2,853,295,000.00**
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	300,000,000.00
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	2,103,689,000.00
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	104,606,000.00
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	195,000,000.00
4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	280 Orang	150,000,000.00
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100%**	**2,707,951,088.00**
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	263,984,000.00
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	575,023,000.00
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	500,000,000.00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	590,560,888.00
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	253,254,000.00
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	525,129,200.00
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya**	**100%**	**2,691,550,000.00**
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	13 Laporan	465,719,000.00
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	13 Laporan	483,493,200.00
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13 Laporan	498,700,900.00
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	13 Laporan	547,699,400.00
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	153,363,300.00

4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	150,000,000.00
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	392,574,200.00
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya**	**100%**	**3,269,565,900.00**
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	5 Dokumen	35,000,000.00
4.02.02.2.04.0002	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	8 Dokumen	2,147,245,900.00
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	28,000,000.00
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 Orang	584,320,000.00
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	17 Dokumen	60,000,000.00
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	15,000,000.00
4.02.02.2.04.0003	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	80 Dokumen	400,000,000.00
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti**	**100%**	**6,573,427,500.00**
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	9 Laporan	150,000,000.00
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	55 Dokumen	35,000,000.00
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses	55 Dokumen	6,238,427,500.00
4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0 Orang	150,000,000.00
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang Diawasi**	**100%**	**296,744,000.00**
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	7 Laporan	296,744,000.00
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun**	**100%**	**256,270,000.00**
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	48 Dokumen	256,270,000.00
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi**	**100%**	**1,346,026,000.00**
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dokumen	600,000,000.00
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	15,000,000.00
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen	296,068,000.00
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7 Dokumen	434,958,000.00
JUMLAH				**107,800,230,000.00**

BAB V
PENUTUP

V.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS/R-APBD Tahun 2026.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung pada tahun 2026 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

V.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat DPRD tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewaktuan serta pencapaian indikator kinerja.
2. Renja Sekretariat DPRD tahun 2026, menjadi dasar bagi penyusunan RKA/DPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

V.3. Rencana Tindak Lanjut

Renja tahun 2026 merupakan dasar asumsi pencapaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2026, dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Oleh karena rencana tindak lanjut yang akan dilakukan diantaranya:

1. Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD melalui Program dan Kegiatan yang memiliki dampak terhadap penguatan tugas dan fungsi DPRD;

2. Melakukan optimalisasi pelaksanaan realisasi anggaran dan kinerja Sekretariat DPRD melalui peningkatan partisipasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Program dan Kegiatan yang telah diagendakan;
3. Melakukan penguatan dukungan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.

Akhir kata, semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan.

Soreang, Juli 2025

SEKRETARIS DPRD

ttd.

UWAIS QORNI

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Nomor				Halaman
1.	Tabel 2.1	:	Capaian Kinerja Program Tahun 2025.....	15
2.	Tabel 2.2 (T-C.29)	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2025 Kabupaten Bandung.....	17
3.	Tabel 2.3 (T-C.30)	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	23
4.	Tabel 2.4 (T-C.31)	:	Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Sekretariat DPR Kabupaten Bandung.....	26
5.	Tabel 2.5 (T-C.32)		Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bandung	35
6.	Tabel 3.1	:	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	38
7.	Tabel 3.2	:	Tabel Tujuan, Sasaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	39
8.	Tabel 3.3 (T-C.33)	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.....	47
9.	Tabel 4.1	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2026.....	54